

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Perlindungan terhadap anak sangat penting, diperlukan perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana. Dalam hal ini anak sering dijadikan sebagai subjek hukum secara ilegal oleh para pelaku kejahatan di bidang narkotika secara khusus dijadikan kurir atau pengedar narkotika, menyebabkan anak dapat ancaman pidana dalam delik perantara jual beli Narkotika dan akan diadili melalui proses peradilan anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pengedar narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam prakteknya.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah penyelesaian perkara pidana perbuatan anak sebagai pengedar narkotika dilakukan di dalam peradilan pidana anak. Tahapan dalam proses peradilan anak: penyidikan (dalam penyidikan dilakukan penangkapan dan penahanan), penuntutan, persidangan dan pelaksanaan hukuman. Dalam khusus ini sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi tidak mengesampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya pertanggungjawaban pidana dari perbuatan anak sebagai pengedar narkotika, sesuai dengan putusan nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb, hakim dalam memutus perkara yang pada dasarnya menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbangkan hak-hak anak, bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Paradigma perlindungan bagi anak-anak seperti ini hendaknya bukan balas dendam dengan cara kriminalisasi anak tapi harus ada aspek penjeraan dan edukatif agar kedepannya anak-anak tidak akan terjebak sebagai pengedar narkotika.

Kata kunci: penerapan pidana, anak, pengedar narkotika

ABSTRACT

The child is the mandate and gift of God Almighty, which in itself is attached to the dignity of the whole person, therefore the child also has human rights recognized by the nations of the world and is the foundation for independence, justice and peace throughout world. Child protection is very important, legislation is needed that protects children from various criminal acts, namely Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The aim is to protect children's rights from all kinds of criminal acts. In this case the child is often used as a legal subject illegally by the perpetrators of narcotics in particular to be used as narcotics couriers or dealers, causing the child to be subject to criminal threats in the offense of the narcotics buying and selling intermediary and will be prosecuted through the juvenile justice process and how the child criminal liability as drug traffickers.

The research method used in this study with a normative juridical legal research method that refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that aim to obtain normative knowledge about the relationship between a rule and regulation others and their application in practice.

The conclusion of the research results is the settlement of criminal cases of the acts of children as drug traffickers carried out in the criminal court of children. Stages in the juvenile justice process: investigation (in the investigation of arrest and detention), prosecution, trial and execution of punishment. In this case, sanctions are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics but do not exclude Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children. The existence of criminal responsibility from the actions of the child as a narcotics dealer, in accordance with the decision number 22/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Jmb, the judge in deciding the case which is basically according to Article 114 paragraph (2) Jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection guarantees the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The legal process can still be done, but must consider the rights of the child, that imprisonment is the last step. Paradigm of protection for children like this should not be revenge by criminalizing children but there must be aspects of enmity and education so that in the future children will not be trapped as narcotics dealers.

Keywords: criminal application, child, narcotics dealer